

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA

No	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
1.	Memperluas kesempatan kerja	1. % calon tenaga kerja yang kompeten	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Daya saing adalah kemampuan tenaga kerja untuk memasuki lapangan kerja ➤ Tenaga kerja yang kompeten adalah tenaga kerja yang didukung oleh keterampilan untuk bekerja 	$\frac{\Sigma \text{ calon tenaga kerja yang dilatih}}{\Sigma \text{ pendaftar pelatihan berbasis kompetensi}} \times 100\%$	Pusdatinaker; Sakernas BPS; Disnaker Provsu; Disnaker Kab/Kota	Balai Latihan Kerja (BLK) Siantar
		2. % tenaga kerja yang ditempatkan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Produktivitas kerja adalah keadaan yang menunjukkan hasil kerja tenaga kerja sebagai pengaruh dari kompetensi tenaga kerja 	$\frac{\Sigma \text{ pencari kerja yang ditempatkan}}{\Sigma \text{ pencari kerja yang terdaftar}} \times 100\%$	Pusdatinaker; Sakernas BPS; Disnaker Provsu; Disnaker Kab/Kota	Bidang Binapenta
		3. % tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sektor informal adalah lingkungan kerja yang diciptakan tenaga kerja baik oleh tenaga kerja maupun yang distimulasi oleh pihak lain 	$\frac{\Sigma \text{ tenaga kerja yang dilatih}}{\Sigma \text{ pendaftar pelatihan kewirausahaan}} \times 100\%$	Pusdatinaker; Sakernas BPS; Disnaker Provsu; Disnaker Kab/Kota	Bidang Binapenta
2.	Meningkatnya kondisi hubungan industrial yang hamonis	1. % kasus perselisihan diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kasus perselisihan hubungan industrial adalah suatu keadaan yang menunjukkan adanya ketidak harmonisan diantara pemberi kerja dan pekerja karena tidak terpenuhinya syarat-syarat kerja 	$\frac{\Sigma \text{ kasus yang diselesaikan melalui PB}}{\Sigma \text{ kasus yang dicatatkan}} \times 100\%$	Pusdatinaker; Sakernas BPS; Disnaker Provsu; Disnaker Kab/Kota	Bidang HI
		2. % Peraturan Perusahaan (PP) yang disahkan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Peraturan Perusahaan (PP) adalah peraturan yang dibuat perusahaan yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan ➤ Disahkan adalah pemberian tanda berupa tanda tangan dan stempel sebagai alat 	$\frac{\Sigma \text{ PP yang disahkan}}{\Sigma \text{ perusahaan yang terdaftar}} \times 100\%$	Pusdatinaker; Sakernas BPS; Disnaker Provsu; Disnaker Kab/Kota	Bidang HI

No	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		3. % Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang didaftarkan	<p>pemeberlakuan suatu aturan/kesepakatan</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Perjanjian Kerja Bersama (PKB) adalah perjanjian antara pekerja dan pengusaha yang muat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja ➤ Didaftarkan adalah dicatatkan dan diberi nomor register oleh instansi yang berwenang 	$\frac{\Sigma \text{PKB yang terdaftar}}{\Sigma \text{perusahaan yang terdaftar}} \times 100\%$	Pusdatinaker; Sakernas BPS; Disnaker Provsu; Disnaker Kab/Kota	Bidang HI
3.	Meningkatnya kesejahteraan tenaga kerja	1. % kepesertaan program jamsostek	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kesejahteraan tenaga kerja adalah kondisi yang menunjukkan terpenuhinya kebutuhan tenaga kerja melalui upah yang diperoleh. ➤ Kepesertaan jamsostek adalah terdaptarnya tenaga kerja untuk mendapat pelayanan sosial ketenagakerjaan oleh pemberi kerja. 	$\frac{\Sigma \text{pekerja/buruh JAMSOSTEK}}{\Sigma \text{pekerja/buruh}} \times 100\%$	Pusdatinaker; Sakernas BPS; Disnaker Provsu; Disnaker Kab/Kota	Bidang HI
		2. % Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap kebutuhan Hidup Layak	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Upah minimum adalah upah bulanan yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh Gubernur. 	$\frac{\Sigma \text{UMP yang ditetapkan}}{\Sigma \text{kebutuhan hidup layak pekerja/buruh}} \times 100\%$	Pusdatinaker; Sakernas BPS; Disnaker Provsu; Disnaker Kab/Kota	Bidang HI
4.	Meningkatnya pengawasan ketenagakerjaan, K3 serta perlindungan pekerja	1. % perusahaan yang menerapkan norma keselamatan dan kesehatan kerja (K3)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Norma K3 adalah peraturan menyangkut syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang harus dipenuhi 	$\frac{\Sigma \text{perusahaan yang menerapkan K3 pd thn } n}{\Sigma \text{perusahaan di wilayah provinsi pd thn } n} \times 100\%$	Pusdatinaker; Sakernas BPS; Disnaker Provsu; Disnaker Kab/Kota	Bidang Perlindungan Ketenagakerjaan
		2. % pemeriksaan ketenagakerjaan di perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pemeriksaan Ketenagakerjaan berdasarkan Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI) terhadap norma ketenagakerjaan dan norma K3 meliputi pemeriksaan pertama, berkala dan ulang 	$\frac{\Sigma \text{perusahaan yang telah diperiksa}}{\Sigma \text{perusahaan yang terdaftar}} \times 100\%$	Pusdatinaker; Sakernas BPS; Disnaker Provsu; Disnaker Kab/Kota	Bidang Perlindungan Ketenagakerjaan

No	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		3. % pengujian peralatan di perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pemeriksaan dan pengujian terhadap seluruh unit objek keselamatan dan kesehatan kerja 	$\frac{\Sigma \text{peralatan yang telah diuji}}{\Sigma \text{peralatan yang telah terdaftar}} \times 100\%$	Pusdatinaker; Sakernas BPS; Disnaker Provsu; Disnaker Kab/Kota	Bidang Perlindungan Ketenagakerjaan
5.	Meningkatnya pembangunan lokasi dan pembinaan masyarakat transmigrasi	1. % lokasi transmigrasi yang layak huni	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Lokasi transmigrasi adalah tempat tinggal transmigran yang terdiri unit pemukiman transmigrasi, usaha dan fasilitas 	$\frac{\Sigma \text{lokasi transmigrasi yang dilayani}}{\Sigma \text{lokasi transmigrasi yang terdaftar}} \times 100\%$	Kemendes, PDT dan Transmigrasi; Disnaker Provsu; Disnaker Kab/Kota	Bidang Ketransmigrasian
		2. % masyarakat transmigran yang sejahtera	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Masyarakat transmigran adalah penduduk yang tinggal di lokasi transmigrasi ➤ Pembinaan masyarakat transmigran adalah kegiatan yang dilaksanakan berupa pelayanan sosial yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat transmigran dan masyarakat lainnya 	$\frac{\Sigma \text{masyarkat transmigran yang dilayani}}{\Sigma \text{masyarakat transmigran yang terdaftar}} \times 100\%$	Kemendes, PDT dan Transmigrasi; Disnaker Provsu; Disnaker Kab/Kota	Bidang Ketransmigrasian

Medan, Oktober 2018



**KEPALA DINAS TENAGA KERJA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**HARIANTO BUTARBUTAR, SE, M.Si
PEMBINA TK I
NIP. 19680916 199503 1 005**